

**FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN TRUMP KELUAR DARI PARIS AGREEMENT  
DILIHAT DARI PERSPEKTIF *DECISION MAKING PROCESS* TAHUN 2016-2020**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**ABHIAFAJRI AMARANGGANA**

18323180

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN TRUMP KELUAR DARI PARIS AGREEMENT**

**DILIHAT DARI PERSPEKTIF *DECISION MAKING PROCESS* TAHUN 2016-2020**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**ABHIAFAJRI AMARANGGANA**

18323180

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN TRUMP KELUAR DARI PARIS  
AGREEMENT DILIHAT DARI PERSPEKTIF *DECISION MAKING*  
*PROCESS* TAHUN 2016-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

23 Agustus 2022

Mengesahkan  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi



  
Haniffa Athana, S.IP., B.Hum.S., M.A

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Wahyu Arif Raharjo, S.I.P., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Willi Ashadi, S.HI., M.A.



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 23 Agustus 2022



Abhlafajri Amaranggana

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'amin

Atas berkat Rahmat dan Ridho Allah Subhana Wata'ala sehingga karya sederhana ini telah dapat diselesaikan dengan rasa kebersyukuran yang mendalam. Atas segala dukungan, perhatian, cinta, serta pacuan semangat dari orang terkasih yang sangat luar biasa.

Oleh sebab itu, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk satu-satunya wanita hebat di hidup penulis yang tidak pernah berhenti bernafas dalam do'a nya:

**Bunda Ir. Suzanna Febriany**

*Someday when the pages of my life end, I know that you will be one of the most beautiful chapter of mine. Merci Beacoup, je t'aime.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah..

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, serta rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Faktor Pendorong Kebijakan Trump Keluar Dari Paris Agreement Dilihat Dari Perspektif Decision Making tahun 2016-2020** dengan sebaik-baiknya. Tugas akhir skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai dukungan dan bantuan yang saya sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia serta rahmat-Nya untuk senantiasa memberi kekuatan, kemudahan dan menjadi sebaik-baiknya pelindung dan penolong hamba nya.
2. Diri ku, untuk tetap percaya dapat menyelesaikan salah satu kewajiban perkuliahan dengan sangat baik hingga bisa sampai di proses pengerjaan skripsi dan sidang akhir.
3. Bunda Ir. Suzanna Febriany dan Papi Sutanto Budiono, S.H. yang selalu mensupport segala usaha dan ikhtiar penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Serta mendoakan untuk kelancaran pengerjaan hingga sidang skripsi dan alhamdulillah dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bunda yang selalu mendoakan agar penulis Inshaallah selalu menjadi anak yang beruntung dan diuntungkan oleh Allah SWT.

4. Wahyu Arif Raharjo, S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, meluangkan waktu nya untuk membantu dalam proses penulisan tugas akhir skripsi hingga selesai.
5. Auracinta Dewakanya, adik tercinta yang selalu memberikan support dan memberikan doa yang terbaik untuk penulis serta menjadi penyemangat untuk penulis.
6. Rido Zakaria Hijrian dan Bapak Soemardono, yang selalu memberikan support, setia menemani pengerjaan skripsi saat di Jakarta dan mendoakan tanpa pamrih.
7. Keluarga Sebelahan, Uncle Tieto, Aunty Ajeng dan adik-adik yang selalu memberikan support.
8. Keluarga Lampung, Titie Septiana Sutarman, Ayah Boru dan Butet Gavrilla Bernadine Abigail Pulungan, yang selalu memberikan support nya walaupun terpaut jarak.
9. Gufron Gozali dan Brian Ridho Zulfikar, terima kasih atas kesabaran nya dalam menjadi mentor penulisan skripsi sejak awal seminar proposal hingga sidang akhir skripsi.
10. Rekha Aulia Rahmaniah dan Syabella Querida Horito. Teman-teman terkasih yang selalu setia meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam mengerjakan revisi dan pengerjaan skripsi.
11. Dina Nur Ayu Febrianti, Cakra Wijaya Kusumah dan Kiki Sri Rahayu, yang selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dan sidang akhir dengan sangat baik. Mereka adalah teman-teman yang sangat *supportive* dan selalu menjadi penyemangat.
12. Seluruh rekan kerja di PT. Mandiri Manajemen Investasi, Mbak Iwani Manzilina, Bang Ari Nugroho dan seluruh Team Magang MMI Jakarta untuk selalu mensupport penulis.

Semoga segala yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Tidak lupa penulis mohon maaf sebesar-besarnya, apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan yang telah penulis lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	1
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	3
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	4
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	5
<b>KATA PENGANTAR</b>	6
<b>DAFTAR ISI</b>	9
<b>DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR</b>	11
<b>ABSTRAK</b>	12
<b>ABSTRACT</b>	12
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	13
<b>1.1 Latar Belakang</b>	13
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	17
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	18
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	18
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	19
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	22
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	26
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	26
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	27
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	27
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	28
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	28
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	28
<b>BAB II</b>	30
<b>AMERIKA SERIKAT DALAM PARIS AGREEMENT</b>	
<b>2.1 Trump Sebagai Decision Maker</b>	30
<b>2.2 Paris Agreement</b>	34

<b>2.3 Amerika Serikat Dalam Paris Agreement</b>	38
	44
<b>BAB III</b>	
<b>ANALISIS <i>DECISION MAKING THEORY</i> RICHARD SNYDER TERHADAP KEBIJAKAN TRUMP KELUAR DARI PARIS AGREEMENT TAHUN 2016- 2020</b>	
<b>3.1 Internal Setting Approach Decision Making</b>	44
3.1.1 <i>Non Human Environment: Kondisi Geografis Kalangan Menengah Amerika Serikat</i>	45
3.1.2 <i>Society: Faktor Pendorong Dari Partai Republikan</i>	47
3.1.3 <i>Human Environment: Kepentingan Domestik Amerika Serikat Sebagai Pertimbangan</i>	50
<b>3.2 Social Structure and Behavior</b>	52
3.2.1 <i>Major Institutional Pattern: Slogan Politik Trump</i>	52
<b>3.3 External Setting Approach Decision Making</b>	55
3.3.1 <i>Societies Organized and Functioning as States and Government Action : Dukungan Arab Saudi dan Aramco</i>	55
3.3.2 <i>Non-Human Environment: Kegagalan Implementasi China</i>	58
	62
<b>BAB IV</b>	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Rekomendasi	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	64

**DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR**

Gambar 1.6 Mind Map Decision Making ..... 22

Tabel 1 Penjelasan Variabel dan Indikator Decision Making..... 24



## ABSTRAK

Keputusan Presiden Trump untuk keluar dari "Paris Agreement" di tahun 2020 sangatlah mengejutkan. Pada saat ini isu lingkungan menjadi salah satu fokus utama dari banyak pihak, kesadaran kolektif mulai terbentuk dan ini melahirkan "Paris Agreement" di tahun 2015. Namun, perlu dipahami bahwa keluarnya Amerika Serikat dari "Paris Agreement" tidak terjadi dalam satu malam. Sejak kampanye pemilihan presiden tahun 2016, Trump melihat bahwa "Paris Agreement" tidak menguntungkan Amerika Serikat. Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sangat mempengaruhi stabilitas domestik dan internasional.

**Kata kunci:** Trump, Paris Agreement, Pengambilan Keputusan, Lingkungan, Ekonomi.

## ABSTRACT

*President Trump's decision to leave the "Paris Agreement" in 2020 was a shock. At this time environmental issues have become one of the main focuses of many parties, collective awareness is starting to form and this gave birth to the "Paris Agreement" in 2015. However, it should be understood that the United States' exit from the "Paris Agreement" did not happen overnight. Since the 2016 presidential election campaign, Trump has seen that the "Paris Agreement" does not benefit the United States. The dynamics that have occurred in the last seven years have greatly affected domestic and international stability.*

**Keywords:** *Trump, Paris Agreement, Decision Making, Environment, Economy.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Keputusan yang diambil oleh pemerintahan Trump untuk keluar dari *Paris Agreement* di tahun 2017 menuai pro dan kontra dari banyak pihak. Tindakan ini sebenarnya dilakukan sejak awal oleh Trump melalui pidato nya saat melakukan kampanye pada pemilu tahun 2016 mengatakan bahwa investasi utama hanya dilakukan untuk keuntungan ekonomi Amerika Serikat bukan untuk membiayai sebuah perjanjian yang merugikan bagi ekonomi Amerika Serikat. Trump ingin menerapkan langkah-langkah untuk memperluas minyak dalam negeri dan hal ini semakin menyelaraskan dengan slogan nya yaitu “*Make American First*”. Realistis nya, hal tersebut memunculkan pemikiran masyarakat umum bahwa dalam hal ini Trump dapat memberikan sesuatu hal yang menjanjikan bagi kepentingan domestik nya. Selain itu adanya kepentingan domestik tersebut, dapat memungkinkan dominasi energi yang lebih besar pada Amerika Serikat terhadap *hydrocarbon*. Mengenai hal dominasi energi Amerika Serikat, negara ini pada saat kepemimpinan Trump melakukan pendekatan desentralisasi dan nasionalis. Namun terdapat beberapa argumen bahwa dengan adanya pendekatan tersebut (melalui dikeluarkannya sebuah kebijakan oleh Trump) malah akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga lapangan bisnis negara. Tetapi, keputusan yang dikeluarkan oleh Trump tetap dijalankan hingga masa jabatannya berakhir (Gordon, Reddy, and Rosenberg 2017,

10-12)

Berkaitan dengan dominasi energi, diketahui bahwa dunia sedang mengalami krisis iklim hingga saat ini. Seluruh masyarakat masih dalam tahap terus melakukan upaya untuk mengurangi dari adanya dampak krisis iklim, terutama pada pengurangan emisi gas karbon. Menurut penulis, studi kasus ini menjadi menarik untuk dibahas karena Amerika Serikat diketahui sebagai salah satu aktor negara pencetus *Paris Agreement* pada tahun 2015 namun, secara tiba-tiba negara ini mengeluarkan diri dari Paris Agreement. Selain itu, faktor lain yang membuat hal ini menarik adalah Trump sebagai kepala negara dan sekaligus *decision maker* membuat kebijakan Amerika Serikat untuk keluar dari *Paris Agreement* menjadi sebuah isu politik yang menuai banyak kontra dari seluruh aktor negara. Sebenarnya, tujuan paling utama kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump ini adalah memenuhi kepentingan nasional Amerika Serikat di atas segalanya (Pranita and Kompas 2021).

Adanya traktat internasional mengenai lingkungan dan pengurangan emisi gas karbon sebenarnya menjadikan wadah seluruh dunia dengan tujuan untuk membantu negara-negara dalam menyelesaikan persoalan krisis iklim. Oleh karena itu, di buatlah salah satu perjanjian internasional dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas karbon dunia dan sebagai salah satu upaya musyawarah antar seluruh negara di dunia terkait penanggulangan krisis iklim. Lahirnya Paris Agreement atau *l'accord de Paris* yang disahkan pada tahun 2015 ini diharapkan sebagai acuan pada setiap negara untuk dapat bisa ikut mencegah kenaikan emisi gas karbon di bumi dan juga dalam rangka berpartisipasi dalam konferensi perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sebanyak 195 negara menandatangani perjanjian

ini dan 141 negara telah meratifikasi. Adanya tujuan dari *Paris Agreement* sendiri adalah memperkuat tanggapan global terhadap ancaman perubahan iklim. Beberapa hal yang dijadikan fokus dalam perjanjian ini adalah menahan kenaikan rata-rata global suhu di bawah 2oC di atas tingkat pra-industri dan mengejar upaya untuk membatasi suhu meningkat menjadi 1,5oC di atas tingkat pra-industri, pengurangan pembangunan emisi gas rumah kaca dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan dan lain-lain (Abeysinghe, Craft, & Tenzing, 2016 19-20)

Selanjutnya, keluarnya Amerika dari *Paris Agreement* juga memungkinkan penurunan dukungan pembiayaan kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim. Diketahui Amerika Serikat juga merupakan kontributor penyedia dana utama untuk *Green Climate Fund* (GCF). Adanya pemotongan dukungan dana yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap GCF bisa saja mempengaruhi kegiatan perubahan iklim di dalam maupun luar negeri. Penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* merupakan sebuah keputusan dari Donald Trump yang sangat mencuri perhatian berbagai kalangan di dunia internasional. Keputusan ini juga didasari oleh slogan Trump saat di awal kampanye yaitu “*Make America Great Again*” (Sinaga, n.d., 413).

Dikatakan bahwa, Amerika Serikat sudah mengambil langkah yang tepat untuk keluar dari Paris Agreement karena mereka merasa harus mementingkan kepentingan nasional dahulu. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah Trump dan pemerintahannya akan lebih mengambil fokus untuk bagaimana Amerika Serikat tetap menduduki posisi teratas dunia dalam sektor perekonomian dan mempromosikan kepada dunia bahwa kepentingan domestik Amerika Serikat di atas segala hal. Dalam hal ini, kepentingan domestik di atas segala hal adalah kepentingan

yang berbaur urusan dalam negeri akan menjadi cakupan terpenting dalam masa pemerintahan Trump untuk mempertimbangkan pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Keputusan yang diambil oleh Trump pada tahun 2017 untuk menarik keluar Amerika Serikat sendiri dari perjanjian besar ini merupakan sebuah kebijakan yang salah menurut banyak pihak. Kesalahan kebijakan ini dapat berdampak buruk bagi Amerika Serikat sendiri kedepannya dan ada yang berpendapat bahwa hal tersebut hanya membuat pertahanan kredibilitas Amerika Serikat dalam lembaga dan multilateral semakin sulit (Sinaga, n.d., 414).

Memang, kebijakan yang dibuat oleh Trump adalah keputusan sepihak yang ia lakukan tanpa melibatkan masyarakat Amerika, namun sejatinya masyarakat domestik lebih memilih mendukung penuh terhadap perjanjian Paris Agreement tersebut. Dalam *Chicago Council Survey*, ada sebanyak 91% mayoritas masyarakat menyatakan bahwa sebenarnya lebih efektif untuk Amerika Serikat bekerjasama dengan dunia internasional demi mewujudkan dan mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Lalu, 8% nya lagi mengatakan bahwa Amerika sebagai negara adikuasa dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi tujuan atau kepentingan negara sendiri dengan cara mandiri. Tidak semua keputusan terkait kebijakan Trump disukai atau dapat diterima oleh berbagai kalangan dan hal tersebut yang kemudian memunculkan adanya pengambilan suara untuk mencapai mufakat dari sebuah pengajuan kebijakan. Meskipun pada masa pemerintahan Trump dirinya sudah banyak keluar dari beberapa perjanjian internasional yang salah satunya Paris Agreement, namun hal ini belum diikuti sepenuhnya sebagai isyarat oleh penduduk Amerika Serikat (Smeltz et al., n.d., 11-20).

Adanya keputusan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini tidak mungkin jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Mengingat pula, bahwa seorang kepala negara setiap menjalankan tugas hingga pada saat mengeluarkan sebuah kebijakan pasti akan melihat bagaimana kondisi real yang memang sedang terjadi di negaranya. Selain itu, Trump juga pastinya sudah memikirkan dampak kedepan dengan tindakannya untuk mengeluarkan kebijakan ini. Trump selalu berkata bahwa kesejahteraan domestik atau dalam negeri lebih di utamakan dan kondisi lingkungan berada di posisi kedua sebagai penyelaras kehidupan negara Amerika Serikat. Selain itu dengan adanya kebijakan Trump ini dapat menjadikan Amerika Serikat bisa lebih berfokus lagi pada urusan administrasi pemerintah seperti apa yang belum tersedia atau masih kurang di dalam masyarakat Amerika Serikat. Seperti Trump dengan slogan *America First* nya diharapkan dapat bisa membantu penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Amerika Serikat. Presiden Trump mungkin juga dapat memperluas jaringan industri dan investasi Amerika Serikat sebagai *income* negara dimasa yang akan datang.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “*Faktor apa saja yang mendorong Amerika Serikat Keluar dari Paris Agreement pada masa pemerintahan presiden Trump Dilihat dari Perspektif Decision Making ?*”

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan analisis faktor-faktor yang melatar belakangi Trump mengeluarkan kebijakan untuk keluar dari Paris Agreement melalui *decision making* teori Richard Snyder

### **I.4. Cakupan Penelitian**

Penulis mengambil topik penelitian ini karena mengingat bahwa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump untuk Amerika Serikat ini sangat kontroversial dan mendapat banyak kritikan dari dalam negeri hingga dunia internasional. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Amerika Serikat merupakan negara adikuasa di dunia dan adanya topik ini menarik untuk dibahas. Namun penulis hanya akan membahas topik ini dalam kurun waktu 2016-2020. Mengingat bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang ikut berperan penting menjadi salah satu pencetus dalam perjanjian ini. Kemudian Trump pada saat pemilihan presiden pada tahun 2016 mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ekonomi Amerika Serikat akan merugi jika hanya berinvestasi kepada perjanjian iklim. Kemudian pada tahun 2017, Trump yang dilantik sebagai presiden Amerika Serikat membuat kebijakan untuk benar-benar keluar dari Paris Agreement. Hal ini dilakukan Trump untuk menjalankan pernyataannya pada saat pemilu tahun sebelumnya dan kemudian menjadikan hal tersebut menjadi sebuah kenyataan. Selanjutnya pada tahun 2020 kebijakan ini berhasil disahkan oleh pemerintahan Trump dan diakui oleh PBB.

### **I.5. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian atau sumber yang membahas terkait kebijakan yang diambil Trump untuk keluar dari Paris Agreement. Dalam jurnal karya Heni Wahyuni dengan judul “Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Paris (Wahyuni 2018, 1794-1800). Heni menjelaskan terkait kondisi kerusakan lingkungan global yang dihadapi oleh dunia internasional. Selain itu kerusakan global juga terjadi berkurangnya kualitas lingkungan secara global yang diakibatkan salah satunya oleh pemanasan global. Kemudian Heni membahas terkait perubahan iklim di masa depan dan dampaknya yang saling berkesinambungan dengan yang terjadi saat ini. Heni dengan begitu baik membahas terkait kesepakatan dan apa saja dampak dari Paris Agreement. Namun, Heni belum menjelaskan terkait dengan bagaimana proses dan faktor internal dan external yang mendorong Trump untuk keluar dari “Paris Agreement”. Maka dari itu penelitian ini akan membahas terkait dengan bagaimana dinamika kebijakan Trump keluar dari Paris Agreement melalui teori *decision making process*.

Selanjutnya masih dalam topik yang sama namun dengan karya tulisan berbeda, dalam sebuah jurnal yang berjudul “Kekuasaan Produktif Amerika Serikat dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement” oleh Fadhlun Nur Hakiem. Penulis membahas terkait bagaimana kekuasaan produktif Amerika Serikat dalam konvensi iklim pasca perubahan iklim Paris Agreement. Dikatakan oleh penulis bahwa walaupun Amerika Serikat menolak ratifikasi perjanjian ini akan tetapi pihak nya berusaha untuk berkomitmen dengan membangun negosiasi COP perubahan iklim. Dijelaskan bahwa Amerika Serikat masih bagian dari konvensi dan tetap dapat mempengaruhi kebijakan

konvensi tersebut. Dikatakan tindakan Amerika Serikat dapat mendorong efek domino dan menimbulkan rasa ketidakpuasan negara-negara industri dan bergerak bersama Amerika Serikat untuk menuntut kesepakatan ulang dari apa yang sudah dihasilkan oleh Paris Agreement. Pengaruh kekuasaan produktif Amerika Serikat terhadap perilaku negara anggota Konvensi Perubahan Iklim pada akhirnya sangat menentukan efektifitas Konvensi dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim di masa mendatang. Pada intinya dalam jurnal ini lebih membahas kondisi politik Amerika dalam keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement (Hakim 2018, 150-165).

Adapun sumber jurnal ketiga, yaitu karangan dari Beryl Rifqi Alhadi menuliskan sebuah jurnal yang berjudul “Kebijakan Donald Trump Keluar Dari Paris Agreement”. Penulis dalam karya tulisnya sendiri mengkaji kasus ini dengan melihat dari beberapa konsep seperti idiosinkratik dan kerangka teori behaviorisme. Dalam jurnal nya penulis juga membahas adanya keterkaitan partai republik dalam melihat keputusan Donald Trump. Dalam hal ini Partai republik tidak percaya perubahan iklim adalah masalah serius. Mereka mengatakan perjanjian paris hanya akan menambah beban pemerintah. Pada kesimpulannya jurnal ini lebih membahas terkait sudut pandang politik dari partai di Amerika Serikat dalam membahas *Paris Agreement*. Selain itu penulis juga menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan pemerintah amerika serikat dengan melihat secara keseluruhan kebijakan Trump untuk keluar dari Paris Agreement menggunakan pendekatan behaviorisme (Alhadi 2018, 5-6).

Kemudian, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Kenny Setya Abdiel dan Muhammad Respati Harun dengan judul “*Rezim Para Penyangkal Pengaruh*

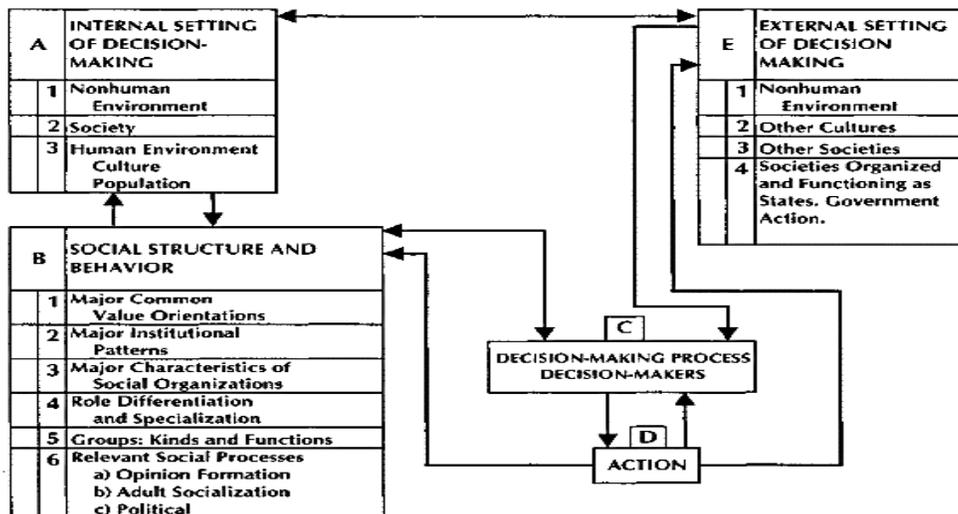
*Kelompok Penyangkal Perubahan Iklim terhadap Kebijakan Politik Amerika Serikat di Bidang Lingkungan*” juga membahas kasus yang sama dengan sudut pandang berbeda. Dalam tulisan mereka, penulis menjelaskan bahwa presiden Trump dinilai merupakan seorang “pengusaha” yang menyangkal akan adanya perubahan iklim. Dijelaskan pula bahwa *conflict of interest* yang terjadi di dalam parlemen terjadi, ketika pemilihan Menteri luar negeri Amerika Serikat yaitu Rex Tillerson yang mana latar belakang beliau adalah seorang mantan Direktur Utama perusahaan Exxon mobil. Dimana, salah satu penyumbang terbesar emisi gas karbon Amerika Serikat berasal dari energi dan transportasi. Dirinya juga merupakan salah satu tokoh yang mendorong adanya izin untuk pengeboran di Arktik, yang mana hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, menurut penulis adanya kebijakan keluar dari *Paris Agreement* sendiri dikarenakan untuk membatalkan atau setidaknya menghambat kebijakan negara yang berpotensi merugikan aktivitas industri. Dalam hal ini adalah kepentingan yang berada di setiap aktor politik di dalam parlemen. Dalam tulisannya juga penulis menggunakan konsep sekuritisasi untuk pengamatan pada kebijakan Trump yang mengambil langkah untuk keluarnya dari *Paris Agreement* (Abdiel & Harun, 2018, 88-96).

Kesimpulannya adalah dari beberapa literatur yang sudah penulis jabarkan, kebanyakan masih membahas atau mengkaji persoalan yang mendasar terkait kasus keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Selain itu ada pula yang membahas bahwa kebijakan Trump ini adalah kepentingan parlemen atau aktor-aktor yang ada dengan tujuan menaikkan ekonomi negara akan tetapi tidak memperhitungkan dampak lingkungan yang ada. Untuk itu dalam bahan tulisan penulis memilih untuk lebih

detail membahas bagaimana faktor pendorong yang menjadikan Trump memilih untuk Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement dilihat dari perspektif *decision making process* yang dijelaskan oleh Richard Snyder.

### I.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Decision Making Theory* dalam versi yang ditulis oleh Richard C Snyder. Menurut Snyder dalam teori pengambilan kebijakan, sebuah kebijakan dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut yang kemudian semakin memperkuat seseorang untuk memutuskan dan menjalankan kebijakan yang ia buat. Kemudian, di dalam teori ini Snyder menjelaskan bahwa terdapat beberapa variabel dari adanya pengambilan keputusan yang dalam hal ini menghasilkan sebuah kebijakan (Snyder, Bruck, and Sapin 2002, 21-23).



Gambar 1.6 Mind Map Decision Making.

Menurut Snyder sebuah pengambilan keputusan tidak akan terjadi jika tidak

ada dorongan faktor *Internal Setting* dan *External Setting*. Menurut Snyder, variabel *Internal Setting* dijelaskan sebagai suatu faktor yang terdapat dari dalam negara atau dalam lingkup aktor internasional. Selain itu, Snyder juga berpendapat bahwa *Internal Setting* identik dengan politik domestik, opini publik yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi sebuah aktor untuk akhirnya membuat sebuah keputusan bahkan menjalankan kebijakan yang telah digagas sebelumnya. Lain hal dengan *External Setting*, yang dijelaskan oleh Snyder adalah sebagai faktor luar yang mengacu kepada hal-hal umum di masyarakat maupun kita dalam bernegara. Seperti adanya faktor dari perbatasan atau daerah teritorial, tindakan atau reaksi pihak lain sebagai pengambil keputusan, masyarakat secara luas maupun dunia internasional. (Snyder, Bruck, and Sapin 2002, 23).

Di dalam variabel *Internal Setting* juga terdapat anak variabel yaitu *Non-Human environment, Society* dan *Human environment*. Kemudian di dalam *External Setting* terdapat pula *Non-Human Environment, Other Culture* dan *Societies Organized and Functioning as States and Government Action*. (Snyder, Bruck, and Sapin 2002, 25). Pada kerangka konsep yang digagas oleh Snyder juga memiliki variabel ketiga yaitu *Social Structure and Behavior*. Di dalam variabel ketiga ini juga terdapat faktor *Major Common Value Orientation, Major Institutional Patterns, Major Characteristics of Social Organizations, Role Differentiations and Specialization, Groups: Kinds and Functions* dan *Relevant Social Process* yang di dalamnya memiliki dorongan pula melalui (a) *Opinion Formation*, (b) *Adult Socialization* dan (c) *Political*.

Pada tulisan ini, penulis akan memakai beberapa variabel guna menganalisis

kebijakan Trump keluar dari Paris Agreement. Hal ini karena studi kasus yang akan penulis analisis memiliki korelasi dengan teori *decision making* yang dijelaskan oleh Richard Snyder. Beberapa variabel yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penjelasan Variabel dan Indikator Decision Making.

<b><i>Internal Setting</i></b>	<b><i>Non-Human Environment</i></b>	Merupakan sebuah faktor yang dapat dilihat dari adanya pengaruh dari dalam domestik atau kondisi geografis yang mempengaruhi suatu negara atau kelompok kepentingan mengeluarkan kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis membahas bagaimana kondisi masyarakat kelas menengah atau buruh menjadi salah satu faktor pendorong Trump mengeluarkan kebijakan keluar dari <i>Paris Agreement</i> .
	<b><i>Society</i></b>	Indikator ini menjelaskan bahwa dengan adanya opini publik atau kelompok kepentingan yang terjadi di masyarakat kemudian bisa mempengaruhi suatu kebijakan dapat terjadi. Penulis dalam hal ini melihat adanya faktor dorongan dari opini partai republikan sebagai masyarakat atau kelompok kepentingan.
	<b><i>Human Environment</i></b>	Berkonsep pada opini manusia atau kelompok masyarakat yang berada di suatu negara dan dapat mempengaruhi seorang decision maker membuat kebijakan karena faktor populasi masyarakat nya. Penulis membahas bagaimana kepentingan

		domestik Amerika Serikat sebagai pertimbangan keluar dari <i>Paris Agreement</i> .
<b><i>Social Structure and Behavior</i></b>	<b><i>Major Institutional Pattern</i></b>	Dijelaskan sebagai adanya dorongan dari pola dan prinsip kebijakan luar negeri suatu negara. Penulis membahas bagaimana prinsip politik Amerika Serikat pada pemerintahan Trump menjadi faktor pendorong Trump untuk membuat suatu kebijakan.
<b><i>External Setting</i></b>	<b><i>Societies Organized and Functioning as States and Government Action</i></b>	Dijelaskan bahwa adanya suatu tindakan dari negara lain dan berpengaruh menjadi bahan pertimbangan. Sebagai analisis penulis mengambil contoh adanya faktor Arab Saudi dan Aramco yang memiliki rasa ketidakadilan yang sama dengan Amerika Serikat dalam melihat regulasi <i>Paris Agreement</i> .
	<b><i>Non-Human Environment</i></b>	Menjelaskan bahwa faktor non-manusia dapat mempengaruhi sebuah negara atau pemerintahan pada akhirnya membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis melihat adanya faktor dorongan dari kegagalan implementasi China terhadap menjalankan regulasi dari <i>Paris Agreement</i> .

### **I.7. Argumen Sementara**

Adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh trump untuk keluar dari *Paris Agreement* sendiri sudah sesuai dengan variabel yang terdapat pada *decision making theory*. Pengambilan kebijakan yang dilakukan Trump bukan hanya semata-mata menjalankan kepentingan nasionalis saja, namun jika dilihat melalui sektor ekonomi juga dapat mempengaruhi perekonomian internasional maupun nasional Amerika Serikat. Seperti contohnya bagaimana jika India dan Tiongkok yang juga mengalami emisi gas karbon dan meratifikasi perjanjian ini tetapi tidak mengikuti aturan yang berjalan, tidak menutup kemungkinan melalui sektor industri dan berlanjut ke laju ekonomi negara pesaing Amerika Serikat tersebut dapat bisa lebih maju dari pergerakan yang dilakukan Amerika Serikat jika tetap terikat dengan *Paris Agreement*. Dampak dari hal tersebut juga secara tidak langsung akan berimbas pada sektor domestik dari Amerika Serikat dan oleh karena itu Donald Trump sendiri sebagai pengambil keputusan (kepala negara) dalam hal ini membuat kebijakan yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup negara Amerika Serikat khususnya pada saat kepemimpinannya.

### **I.8. Metode Penelitian**

Dalam pembahasan penelitian kasus ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam metode penelitian ini. Kemudian landasan teori dimanfaatkan

sebagai pemandu agar sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun cara memperoleh data dari penggunaan metode kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data yang ada dari beberapa sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah.

#### *1.8.1. Jenis Penelitian*

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan informasi dari perilaku subjek penelitian yang diamati. Dalam penelitian ini tidak ada perlakuan yang ditambahkan atau dikurangi dalam perolehan data, penelitian ini menggambarkan suatu gejala, kondisi dan sifat situasi secara apa adanya tanpa adanya manipulasi. Penelitian deskriptif kualitatif juga memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam tulisan ini, penulis ingin memberikan penjelasan terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi munculnya kebijakan Paris Agreement.

#### *1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian*

Adapun subjek penelitian dari tulisan ini adalah Donald Trump. Trump dan pemerintah nya adalah sebagai pembuat, pemutus dan yang menjalankan kebijakan yang ada. Sedangkan Objek penelitian dalam tulisan ini adalah adanya kebijakan dari Trump yang memutuskan untuk keluar dari Paris

Agreement. Selain itu dilihat juga bagaimana keputusan tersebut dapat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan oleh Trump dan pada akhirnya membuat sebuah kebijakan untuk Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement.

#### *I.8.3. Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data dari penulisan skripsi ini adalah dari sumber berita, jurnal serta dokumen resmi di website. Selain itu berbagai sumber lainnya juga dapat dijadikan bahan untuk pengumpulan data yang tentunya sesuai dengan fakta (dengan data yang konkrit) dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini yang nantinya akan membantu menjawab rumusan masalah yang telah diberikan oleh penulis.

#### *I.8.4. Proses Penelitian*

Terkait proses penelitian, penulis menganalisa studi kasus dengan acuan dari landasan konseptual serta sumber-sumber lainnya, seperti jurnal, buku dan berita resmi. Selain itu penulis juga dapat menganalisa dari adanya catatan resmi yang dikeluarkan oleh website terkait Paris Agreement dan kebijakan Trump terhadap Amerika sendiri.

### **I.9. Sistematika Pembahasan**

Pada bab pertama penulis membahas latar belakang dari adanya kebijakan Trump untuk membuat Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement. Selain itu juga

penulis menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisa studi kasus. Pada bab kedua penulis membahas bagaimana posisi dan pandangan trump dalam adanya Paris Agreement sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk membuat kebijakan keluar dari perjanjian tersebut. Pada bab ketiga penulis akan menganalisis studi kasus dengan teori Snyder dengan variabel external dan internal. Memasuki bab keempat penulis akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait analisis kebijakan trump keluar dari paris agreement dalam perspektif *decision making process*.



## BAB II

### AMERIKA SERIKAT DALAM PARIS AGREEMENT

Berdasarkan pada latar belakang, tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dijelaskan secara singkat pada bab sebelumnya, maka kemudian pada bab ini di bagian pertama penulis akan membahas terkait bagaimana ke elektabilitas Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang memiliki peran besar sebagai *decision maker*. Kemudian menjelaskan secara singkat mengenai Paris Agreement dan aktor negaranya. Adapun hal lain yang akan dibahas adalah bagaimana posisi Amerika Serikat sebagai negara maju di dalam regulasi *Paris Agreement* dan kemudian apa yang membuat rasa tidak adil bagi pihak Amerika Serikat khususnya pemerintahan Trump muncul karena perjanjian tersebut. Kedua hal tersebut yang pada akhirnya akan saling terkait dengan adanya keputusan bulat Trump untuk mengeluarkan kebijakan Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement*.

#### 2.1 Trump Sebagai Decision Makers

Donald Trump merupakan salah satu Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Memang, mulai dari saat awal melakukan kampanye dalam pemilihan presiden beliau sudah sangat vokal untuk menyuarakan beberapa argumen yang menurut sudut pandangnya adalah hal baik untuk Amerika Serikat jika dipimpin oleh pemerintahannya. Salah satu yang populer adalah slogannya yang selalu berkata “*we make American great again*” dan “*American First*”. Dimana kedua hal ini saling terkait dengan bagaimana Trump dalam mengambil sebuah

kebijakan dan sebagai doktrin dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump. Perlu diketahui bahwa slogan ini menjadi paten bagi pemerintahan Trump dan beliau meminta persetujuan dengan tanda tangan kepada *U.S Trademark and Paten Office* guna meminta hak eksklusif dari penggunaan slogan “make american great again”. Hal ini dilakukan Trump dengan salah satu alasan yaitu agar dapat membangun kesadaran masyarakat Amerika Serikat terhadap isu-isu politik. Slogan yang digunakan oleh Trump ini yang kemudian menjadi pegangan Trump dalam melakukan kegiatan perpolitikan pada masa pemerintahannya (Tumulty 2017).

Adanya slogan yang selalu digunakan oleh Trump ini memang menjadi senjata utama beliau dalam menjalankan kegiatan politik Amerika Serikat. Memang slogan yang baik, tidak juga berarti bahwa apa yang dilakukan kemudian oleh Trump sebagai presiden juga akan sebaik slogannya. Namun fokus utama Trump dari awal sampai pemerintahannya berakhir pun tetap menjunjung slogan ini di berbagai kegiatan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Amerika Serikat bahwa kepentingan nasionalis harus menjadi hal yang utama. Hingga pada saat mengeluarkan kebijakan, Trump tetap menggunakan kedua slogan untuk melihat apakah kebijakan tersebut memberikan keuntungan yang penuh bagi Amerika Serikat atau tidak. American first adalah slogan yang sering digambarkan oleh Trump sebagai kepentingan Amerika Serikat adalah yang paling utama. Selain itu, slogan ini juga dapat berupa kiasan terhadap Amerika Serikat yang merupakan negara super power untuk mempromosikan negara mereka adalah negara dengan kekuatan yang besar. Trump sebagai presiden dan juga secara tidak langsung sebagai pemangku kepentingan dari pembuatan kebijakan dapat menggunakan slogan ini agar nantinya dari kebijakan yang dikeluarkan tetap

berjalan sesuai dengan rasa nasionalis Trump kepada Amerika Serikat. Dalam pembuatan kebijakan Trump juga mempromosikan dirinya bukan hanya sebagai pemimpin negara yang baik, tetapi juga sebagai pembuat kebijakan yang dapat membuat sebuah kebijakan yang hebat (McTague dan Nicholas 2020).

Jika masuk dan melihat ke pembahasan salah satu contoh kebijakan Trump yaitu menarik Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement adalah bentuk dari Trump menjalankan slogan politik dalam pemerintahannya. Akan tetapi, kebijakan ini banyak ditentang oleh beberapa kelompok bahkan negara lainnya di dunia. Trump yang melihat keadaan ini tetap memposisikan dirinya sebagai decision makers dan pemegang kekuasaan atas negaranya. Jika memang apa yang dilakukan Trump hanya semata-mata untuk membangkitkan rasa nasionalisnya terhadap pertumbuhan Amerika Serikat itu merupakan sebuah tindakan Trump sebagai kepala negara dalam memimpin negaranya. Dari sisi kepala negara, Trump berupaya untuk menjaga kestabilan citra dan power dari Amerika Serikat di mata dunia dengan caranya. Dalam melihat hal seperti ini, menurut penulis pun kita tidak dapat menjudge sebelah mata tindakan Trump ataupun kebijakannya. Hal ini karena sebagai seorang pemangku kebijakan tertinggi suatu negara, pasti presiden sudah melakukan pemilahan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Pemilahan ini juga berlaku kepada pengambilan kebijakan dari awal pembuatan keputusan, perundingan dan hingga kebijakan tersebut direalisasikan juga pasti sebagai seorang kepala negara akan tetap mengawal itu semua.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kebijakan Trump untuk akhirnya menarik diri dari *Paris Agreement* adalah keputusan yang besar. Mengingat juga bahwa Trump merupakan seorang pemimpin yang berasal dari partai

republikan, sudah pasti apapun keputusan Trump akan didukung penuh oleh partai nya. Isu lingkungan dan hubungannya dengan kebijakan Trump untuk keluar dari *Paris Agreement* secara tidak langsung juga didapat melalui dorongan partai republikan. Hanya sepertiga bagian dari partai republikan dengan jumlah total 85 persen yang berpendapat bahwa menjaga lingkungan dari efek produksi energi gas, minyak bumi dan batu bara adalah prioritas utama. Ini menunjukkan bahwa sisa nya memang mendukung kebijakan Trump dengan berbagai alasan dan kepentingan partai tersebut. Pemikiran Trump maupun kelompok kepentingan melihat *Paris Agreement* menjadi sesuatu hal yang merugikan bisa jadi hal yang jawaban nya iya. Jika dilihat lagi dengan slogan yang Trump selalu gunakan, *Paris Agreement* hanya akan membuat negara-negara yang ada secara tidak langsung terikat dengan perjanjian itu dan lambat laun berdampak pada kondisi negara juga. *American first* jika dilihat lebih dalam lagi memiliki arti bagi masyarakat Amerika. Trump mengatakan bahwa dengan mengeluarkan kebijakan penarikan diri dari Paris Agreement dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Amerika Serikat yang ingin bekerja di sektor industri batu bara. Trump secara tidak langsung menempatkan kepentingan masyarakat Amerika Serikat di posisi pertama dengan berupaya untuk memberikan sedikit demi sedikit harapan bagi lapangan pekerjaan (Jr., Perry Bacon; Enten, Harry; 2017).

Persamaan tujuan yang Trump lakukan untuk kemajuan Amerika Serikat dengan slogan *American first* dan *make American great again* adalah semata-mata untuk masyarakat terlebih negara itu sendiri. Citra baik dan powerfull negara Amerika Serikat memang sudah tergambar sejak sebelum pemerintahan Trump. Namun pada saat Trump maju dibagku presiden, beliau hanya ingin menciptakan citra baik tersebut

dan tidak menghilangkannya. Amerika Serikat merupakan sebuah negara dengan kekuasaan yang besar bukan hanya dari pemerintahan, kepala negara dan instrumen negaranya saja. Akan tetapi raja industri perekonomian juga banyak sekali berkembang di negara ini. Melihat situasi dan kondisi ini, menurut penulis sangatlah wajar jika Trump bersikeras untuk membuat sebuah kebijakan yang memprioritaskan sektor bidang ekonomi khususnya lapangan kerja dan investasi industri. Penulis melihat bahwa yang dilakukan Trump mungkin memang berdampak tidak baik bagi audience internasional, namun semua ini lahi-lagi dilakukan seorang kepala negara untuk tetap mempertahankan kondisi nasional nya. Hal ini juga sempat disinggung bahwa beliau akan tetap berpartisipasi dalam pengurangan pemanasan global dengan menggunakan cara nya sendiri. Ini berarti tetap membuka langkah baik bagi perbaikan lingkungan Amerika Serikat. Terakhir, penulis melihat bahwa tujuan paling utama dari Trump untuk semua kebijakan yang dikelaurkan adalah hanya untuk mengingatkan kepada dunia luar bahwa Amerika Serikat berada pada posisi yang stabil untuk menjadi negara yang berkuasa. Hal ini juga disusul dengan citra Trump sebagai presiden yang secara tidak langsung mempengaruhi sudut pandang aktor internasional terhadap Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki power kuat atau negara adidaya.

## **2.2 Paris Agreement**

Terdapat 190 partai dan juga seluruh member Uni Eropa yang melakukan penandatanganan dalam perjanjian Paris Agreement sendiri. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2016, negara-negara Uni Eropa meratifikasi adanya Paris Agreement dan hal ini

menunjukkan adanya keikutsertaan negara Eropa terhadap perjanjian iklim ini. Sebenarnya dalam proses pembuatan perjanjian Paris Agreement, European Union juga ikut berperan menyatukan negara-negara maju dan berkembang untuk ikut serta dalam ratifikasi perjanjian ini pada tahun 2016. Pada saat konferensi Paris Agreement berlangsung, negara-negara yang mengikuti pertemuan tersebut telah menyusun dokumen terkait data pengurangan emisi gas karbon negara mereka masing-masing sebanyak 40%. Fokus utama dari perjanjian ini adalah mengenai bagaimana setiap negara di dunia dapat mengurangi emisi gas karbon yang ada. Pengurangan emisi gas karbon ini dilakukan agar negara-negara di dunia memiliki lingkungan dan udara yang bersih. Dampak terbesarnya juga dirasakan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut. Adanya perjanjian Paris ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah mitigasi untuk seluruh negara sebagai upaya untuk mengurangi kenaikan emisi gas karbon (Library Congress, 2016).

Untuk progress dari berjalannya perjanjian ini, setiap negara memberikan tinjauan atau laporan negaranya setiap lima tahun terkait penurunan emisi gas karbon dan bagaimana upaya yang telah dilakukan di setiap sidang pertemuan kongres. Di dalam Paris Agreement, terdapat negara-negara maju dan berkembang. Pada dasarnya, sistem yang diterapkan pada perjanjian iklim ini adalah negara maju berupaya ikut membantu negara berkembang untuk saling mengatasi krisis iklim. Upaya mengatasi krisis iklim yang ada dilakukan melalui pembuatan Paris Agreement ini sendiri. Implementasi dari *Paris Agreement* sendiri sebenarnya sudah berjalan melalui perundingan dari beberapa negara-negara yang ikut menandatangani serta meratifikasi perjanjian ini. Namun, ada pula beberapa negara yang masih dalam progress untuk

menjalankan syarat-syarat untuk melengkapi ratifikasi dari perjanjian ini (United Nations, 2020).

*Paris Agreement* adalah perjanjian internasional yang berfokus pada pengurangan emisi gas karbon, juga bagaimana peran dari negara-negara yang ada ikut berinvestasi dalam energi berkelanjutan dan meminimalkan kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan. Benar bahwa seluruh aktor memiliki kesepakatan untuk dapat mengurangi 2 celcius, akan tetapi hal ini menjadi tindakan yang tidak ambisius. Hal ini dikarenakan setiap negara masih ada yang tidak benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan aturan perjanjian ini. Hal ini juga berkaitan dengan tidak adanya pajak karbon yang ditetapkan di dalam Paris Agreement dan hal tersebut menyebabkan banyak negara anggota yang bisa tidak mematuhi aturan dalam perjanjian. Amerika Serikat dan beberapa negara maju yang meratifikasi perjanjian ini adalah tiang utama penyupply dana guna melancarkan perjanjian ini. Hal tersebut tidak dapat secara terus menerus dilakukan karena akan merugikan pihak negara maju. Tanpa pajak karbon, tidak ada pula insentif keuangan bagi seluruh negara untuk berhenti menggunakan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber daya berkelanjutan. Sebenarnya salah satu cara paling efektif untuk mengatasi perubahan iklim adalah dengan mengambil uang investasi dari perusahaan yang membahayakan planet kita, dan menginvestasikan uang itu di perusahaan yang secara aktif mempromosikan pengurangan emisi gas karbon untuk menjaga lingkungan. Menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), mengatakan bahwa sejak saat ini diperkirakan setiap negara harus mengeluarkan sebanyak 2,4 Trilliun USD untuk supply pengembangan energi guna mencegah penambahan emisi karbon yang sangat besar di tahun 2035 (Beslik 2019).

Sebenarnya perjanjian ini memang dibuat tidak untuk mengikat negara yang ada, akan tetapi dikarenakan negara maju lebih memiliki kekuatan untuk “mengubah dunia” dari segi pendanaan dan vokal yang akan lebih di dengar oleh seluruh dunia dalam hal pengurangan emisi gas karbon. Hal ini yang menjadikan negara maju sebagai aktor utama dari *Paris Agreement*. Adanya perubahan iklim atau krisis iklim yang menyerang dunia internasional membuat setiap negara diharuskan memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama melakukan upaya agar hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang bersifat berkepanjangan. Melalui *Paris Agreement* seluruh negara maju dan berkembang yang ikut menandatangani perjanjian diajak untuk saling bekerjasama untuk mewujudkan implementasi dari beberapa aturan yang sudah dituangkan di dalam traktat tersebut.

Salah satu nya adalah implementasi untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dari adanya dampak krisis iklim yang kemudian menjadi kunci keamanan dan juga kemakmuran bagi seluruh negara-negara di dunia. Akan tetapi perjanjian dan regulasi yang ada di dalam *Paris Agreement* masih banyak yang tidak dilakukan secara penuh oleh negara di dunia. Pemerintah di tiap negara umumnya sepakat tentang masalah perubahan iklim, tetapi tidak dapat mengambil fokus utama dan mengusahakan dengan secara baik perjanjian tersebut. *Paris Agreement* hanya berfokus kepada siapa yang paling bertanggung jawab dan bagaimana menetapkan tujuan dari pengurangan emisi gas karbon. Hal ini yang membuat masih banyak dari negara-negara yang laju kenaikan emisinya tidak teratur kurang berniat dan “janji-

janji” yang ada di dalam *Paris Agreement* hanyalah sebuah tulisan yang di sahkan disebuah kertas saja.

### **2.3 Amerika Serikat dalam Paris Agreement**

Amerika Serikat dan *Paris Agreement* memiliki keterkaitan yang sebenarnya tidak dapat terlepas. Bagaimana tidak, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menggagas adanya *awareness* terhadap perubahan iklim akibat pemanasan global di dunia dan juga sebagai penyuplai dana bagi negara berkembang di dalam *Paris Agreement*. Beberapa kepala negara Amerika Serikat, khususnya sebelum Donald Trump juga menyetujui adanya perjanjian ini dengan alasan utama yaitu untuk mengurangi adanya perubahan iklim akibat pemanasan global dan emisi gas karbon. Pada bulan Juni di tahun 2017, Donald Trump melakukan *walked out* dari perjanjian iklim ini. *Paris Agreement* pun sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan lebih digagas kembali pada tahun 2015. Adanya perjanjian ini memiliki tujuan utama yaitu melihat respon secara global dan universal bagaimana setiap negara memiliki kepekaan terhadap krisis iklim yang terjadi di bumi (McGrath, 2020).

Hal tersebut berbeda pada saat Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat dan mengeluarkan kebijakan untuk Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement*. Dalam hal ini Amerika Serikat sangat berperan sebagai salah satu negara adidaya yang juga ikut meratifikasi *Paris Agreement*. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, memang benar Amerika Serikat menjadi tiang utama dari perjalanan *Paris Agreement*, mulai dari pembentukan Protokol Kyoto, lalu berubah

menjadi *Paris Agreement*. Perlu diketahui, berbeda kepala negara, berbeda juga bagaimana cara mereka melihat sebuah kondisi negara nya tersebut. Masa pemerintahan Trump membuat Amerika Serikat memang lebih memfokuskan negaranya dalam bidang ekonomi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat. Donald Trump sendiri memposisikan dirinya untuk tidak terikat di dalam *Paris Agreement* karena menurutnya hal tersebut merugikan bagi laju ekonomi Amerika Serikat.

Perlu diketahui bahwa dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat di dalam *Paris Agreement* memang sudah terjalin mulai dari awal perjanjian ini dibuat. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu negara yang ikut untuk mengesahkan adanya perjanjian lingkungan internasional yang dikhususkan untuk pengurangan emisi gas karbon dunia. Di dalam *Paris Agreement*, disebutkan beberapa poin atau regulasi yang menurut Trump sendiri hal ini merugikan Amerika Serikat dan semakin memperkuat langkah Trump untuk tidak mengikuti perjanjian ini. Seperti yang terdapat pada poin 1 di Article 9 dalam *Paris Agreement*, disebutkan bahwa “*Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention*”. Kemudian pada point 3 disebutkan pula “*As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities*

*of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.”* (United Nations Framework Convention on Climate Change 2015, 8).

Donald Trump semakin memperkuat posisi Amerika Serikat untuk kemudian mengambil langkah menghentikan semua implementasi terhadap *Paris Agreement*. Hal ini dilakukan agar tidak membebani keuangan dan ekonomi Amerika Serikat yang semula dibebankan kepada Amerika Serikat. Trump sebagai presiden Amerika Serikat pada saat itu pun beranggapan bahwa dirinya dan Amerika Serikat dapat membuat sesuatu yang jauh lebih baik dari *Paris Agreement* untuk mengatasi emisi gas karbon negaranya. Sebenarnya aksi dari Trump sendiri cukup menjelaskan bahwa keteguhan keputusannya tersebut terjadi karena ada beberapa poin dari regulasi *Paris Agreement* yang dirasa merugikan. Hal ini yang kemudian menjadikan posisi Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi *Paris Agreement*, mengambil langkah untuk keluar dari perjanjian tersebut. Memang benar, bahwa kondisi alam dan lingkungan sangat perlu untuk dijaga secara universal. Akan tetapi, regulasi yang ada juga seharusnya dapat berlaku adil agar tidak terdapat rasa ketimpangan sosial oleh negara-negara yang mengikuti perjanjian tersebut (Larison 2017).

Pada saat Trump mengeluarkan suara untuk Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement*, Trump memposisikan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional yang lebih penting. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dan penjelasan sebelumnya, bahwa secara umum Trump hanya ingin kepentingan nasional Amerika Serikat terpenuhi secara baik. Amerika Serikat memang merupakan negara

maju dan memiliki power yang sangat besar di dunia. Oleh karena itu Trump merasa bahwa ektabilitas Amerika Serikat tidak boleh menurun. Melihat dari beberapa presiden yang berasal dari partai yang sama oleh Trump di pemerintahan Amerika Serikat terdahulu, Trump menginginkan bahwa pemerintahannya dapat mengembalikan atau menambah eksistensi Amerika Serikat yang “kuat” dalam bidang perekonomian tetap pada peringkat pertama dunia seperti yang sudah dijalankan sebelumnya oleh presiden terdahulu dengan kubu yang sama dengan beliau. Karena nya, Trump merasa dengan Amerika Serikat yang memiliki citra besar di dunia kemudian masih tetap terikat dengan *Paris Agreement* itu adalah hal yang buang-buang waktu. Krena Trump sendiri merasa bahwa, kepentingan masyarakat Amerika Serikat tetap yang utama dan adanya perjanjian tersebut hanya untuk mendapatkan “pujian” dari aktivis global dengan memanfaatkan citra Amerika Serikat sebagai negara maju. Hal tersbut menurut Trump tidak menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kondisi Amerika Serikat, karena jika memang Amerika Serikat ingin maju itu berarti harus dimulai melalui kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat apalagi ekonomi nya dahulu. Bagian iklim dan lainnya adalah hal-hal pendukung lain yang menutu trump hal tersebut tetap dapat dilakukan oleh Amerika Serikat melalui pemerintahan Trump dengan cara yang berbeda tanpa harus sesuai dengan aturan yang ada di *Paris Agreement*. Point pentingnya adalah Amerika Serikat dapat tetap mengurangi emisi gas karbon negaranya dengan cara berbeda dengan yang dilakukan negara-negara lain di *Paris Agreement* tanpa harus merugikan keadaan ekonomi pemerintahan Amerika Serikat (Smith 2021).

Regulasi atau aturan yang ada di dalam *Paris Agreement* merupakan hal yang berisi “janji” dan jika janji tersebut hanya di tuliskan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya oleh anggota negara juga akan menghadirkan dampak yang tidak baik. Pemerintah trump merasa bahwa janji dari regulasi yang ada pada Paris Agreement hanya menjadi sebuah tindakan tidak adil bagi Amerika Serikat. Mengingat pula bahwa Paris Agreement sejak awal membiarkan negara maju untuk mengatur krisis iklim dunia dan menurut Trump krisis iklim dunia bukan hanya menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat dijadikan aktor utama dalam perjanjian dikarenakan power yang ada. Adanya regulasi dari *Paris Agreement* juga dapat mempengaruhi urusan domestik dan hal tersebut bisa saja mengganggu kestabilan negara dalam segala hal. Dikatakan bahwa *Paris Agreement* memang mungkin sudah berhasil untuk menjahit semua visi dan misi negara-negara di dunia untuk saling menjaga lingkungan dari kenaikan emisi gas karbon. Akan tetapi, jika keseluruhan perjanjian ini tidak dijalankan dengan ambisi yang serius maka perjanjian hanyalah sebuah perjanjian saja. Oleh karena itu, Trump berulang kali di setiap pidatonya mengenai kebijakannya untuk menarik diri dari *Paris Agreement* dikarenakan posisi Amerika Serikat memang dilihat dari sudut pandang beliau sebagai kepala negara hanyalah sebuah ambisi yang tidak terlalu penting dan mengikat juga sekali lagi merugikan Amerika Serikat dengan citra negara yang sudah di level 1 dunia (Raiser, et al. 2020).

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa Posisi Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* memang sangat dibutuhkan. Akan tetapi kembali lagi dengan adanya beberapa point dalam regulasi di dalam perjanjian yang membuat Trump pada akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk keluar dari *Paris Agreement*. Hal ini karena Amerika

Serikat yang dianggap negara yang memiliki kekuatan besar untuk dapat membantu berjalannya perjanjian ini. Hal ini yang kemudian membuat Trump sekali lagi merasa bahwa Paris Agreement memanfaatkan kekuasaan Amerika Serikat dan posisi Amerika Serikat menjadi sangat penting di dalam perjanjian itu. Untuk itu Trump merasa merugi hingga akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menarik Amerika Serikat dari *Paris Agreement*.



## BAB III

### ANALISIS *DECISION MAKING THEORY* RICHARD SNYDER TERHADAP KEBIJAKAN TRUMP KELUAR DARI PARIS AGREEMENT TAHUN 2016-2020

Adanya kebijakan Trump untuk membuat Amerika Serikat keluar dari perjanjian lingkungan ini sangat bertentangan dengan semua pihak. Selain itu adanya perjanjian Paris Agreement ini juga membuat beberapa kondisi negara Amerika Serikat berubah, mulai dari segi lingkungan, politik dan ekonomi. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kebijakan Trump keluar dari *Paris Agreement* dengan dilihat menggunakan teori *Decision Making*. Selain itu juga penulis akan menganalisis studi kasus dengan variabel teori Snyder, yaitu *internal setting*, *social structure and behavior* dan *external setting*. Penulis juga akan menambahkan beberapa data-data melalui jurnal agar sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

#### 3.1 Internal Setting Approach Decision Making

Dalam sebuah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap aktor internasional, tidak mungkin dilakukan tanpa adanya pemikiran yang matang. Jika dilihat dari konsep *Decision Making* oleh Richard C Snyder. Sebuah pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan dilakukan karena adanya dorongan secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa faktor tertentu. Faktor pertama yang dapat dilihat adalah faktor *internal setting*. Dalam hal ini, faktor dalam negeri dijadikan alasan kuat

mengapa suatu aktor akan mengambil sebuah keputusan untuk kemudian membuat suatu kebijakan. Bisa saja dilihat dari kondisi ekonomi dalam negeri atau pertumbuhan sosial negara tersebut yang sebenarnya berdampak pada kondisi negara tersebut. *Internal setting* yang dijelaskan oleh penulis adalah segala sesuatu yang mencakup suatu hal yang berada di dalam domestik atau faktor dalam negeri. Dalam studi kasus ini, penulis menggunakan variabel *internal setting* dengan indikator *non human environment*, *society* dan *human environment* dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Trump untuk keluar dari *Paris Agreement*.

### *3.1.1 Non Human Environment: Kondisi Geografis Kalangan Menengah Amerika Serikat*

Seperti yang diketahui oleh banyak kalangan, bahwa di Amerika Serikat memang memiliki tingkatan atau kelas bagi persebaran masyarakatnya. Seperti contohnya kaum atau kelas atas yaitu kelas urban adalah pemegang kepentingan paling atas dikalangan masyarakat. Selanjutnya di kelas menengah terdapat sektor buruh dan pekerja yang mana mereka adalah tonggak dari jalannya industri Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki sumber daya alam yang melimpah pada sektor pertambangan. Hanya kaum kelas menengah yang akan mau untuk memiliki pekerjaan sebagai buruh upah dan bersedia bekerja di sektor pertambangan tersebut. Jika masyarakat kelas menengah hilang dan hancur, maka masyarakat kelas atas Amerika Serikat akan kesusahan untuk mencari siapa pekerja yang bertugas mengelola sumber daya mereka. Padahal dalam sektor pertambangan sendiri banyak pekerja atau buruh yang dipekerjakan adalah berasal dari masyarakat kelas menengah. Sebagai salah satu

contoh pada tahun 2017 pendapatan masyarakat kelas menengah dari penghasilan mereka sebagai pekerja buruh adalah sekitar \$25.000 dan \$120.000. Hal ini setidaknya dapat mensejahterakan masyarakat di kalangan kelas menengah dan sebagai imbalan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Setidaknya, lapangan pekerjaan akan tetap ada bagi mereka masyarakat kelas menengah yang tidak seberuntung memiliki kekayaan berlimpah seperti masyarakat kelas urban atau atas (Berube 2018).

Salah satu contoh kondisi geografis Amerika Serikat adalah kondisi New York pada tahun 1900an sampai 2000 yang mengalami penurunan di sektor ekonomi. Wilayah ini kehilangan pendapatan lapangan pekerjaan dan sebanyak 10% masyarakat menjadi pengangguran, tanggungan dari beberapa hutang publik dan masyarakat banyak yang melarikan diri dari pusat kota ke daerah pinggir untuk mencari mata pencarian baru. Namun jika dilihat pada tahun 2015, New York sendiri telah berubah menjadi salah satu kota yang megah dan masyarakat kelas atas sudah banyak ikut andil di dalam kemajuan berbagai sektor penggerak kota ini (Galka 2017). Hal ini menandakan bahwa sebenarnya jika pemerintahan tidak tetap mengedepankan pengelolaan sektor ekonomi dari segi kondisi geografis dengan lebih baik, tidak menutup kemungkinan bahwa inflasi yang dialami kota-kota di Amerika Serikat akan dapat terulang kembali di tahun yang akan datang.

Menurut penulis, jika ditarik benang merah bagaimana kondisi geografis masyarakat Amerika Serikat dengan adanya kebijakan Trump untuk keluar dari *Paris Agreement* melalui indikator *non human environment* ini adalah hal yang memiliki keselarasan. Pada dasarnya Trump sebagai kepala negara dan jauh sebelum beliau menjabat sebagai kepala negara pasti sudah mengetahui dan melihat bagaimana

perbedaan pendapatan ekonomi dari masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Adanya faktor perbedaan laju pendapatan ekonomi ini yang kemudian menjadikan Trump untuk berpikir bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana dirinya sebagai kepala negara dapat tetap menjaga kestabilan ekonomi Amerika Serikat. Mengingat pula bahwa sejarah pengangguran yang pernah terjadi di kalangan masyarakat negara bagian Amerika Serikat menunjukkan angka yang tidak sedikit. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong Trump melihat bahwa masih banyak hal penting untuk di bahas dan dijaga tanpa harus merasa terikat dengan satu regulasi yang merugikan negara nya.

### *3.1.2 Society: Faktor Pendorong Dari Partai Republikan*

Seperti yang sudah disinggung pada bahasan sebelumnya, mengenai faktor internal Trump yang menjadikan beliau akhirnya mengambil kebijakan untuk menarik Amerika Serikat dari *Paris Agreement* itu tidak semata-mata melihat dari kacamata diri sendiri. Adapula dorongan publik Amerika Serikat yaitu melalui partai republikan yang dimana mereka (para senator) yang bersama-sama menuliskan sebuah surat petisi terhadap Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sebanyak 22 senator seperti salah satunya adalah James Inhofe, menulis surat untuk Trump sebagai bentuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh Trump. Partai republikan ini adalah mereka yang sebenarnya menjelma menjadi kelompok kepentingan pada sektor industri minyak, gas bumi dan batu bara. Mereka mendorong Trump untuk keluar dari *Paris Agreement* dikarenakan memiliki kepentingan yaitu sudah mengumpulkan \$10juta dalam bentuk uang hasil dari investasi industri minyak, gas bumi dan batu bara. Hal ini yang kemudian semakin menguatkan Trump di sisi lain sudut pandangnya terkait “rugi” nya

Amerika Serikat dalam sektor ekonomi jika tetap bergabung dengan *Paris Agreement* namun dorongan dari kelompok kepentingan juga menjadikan tekad Trump semakin bulat. Adanya dana yang didapatkan oleh kelompok kepentingan ini adalah sebuah pendapatan negara yang dapat dikelola Trump dan pemerintahannya dalam pengembangan industri minyak bumi, gas dan batu bara (McCarthy 2017).

Adapun point utama dari kelompok kepentingan, khususnya partai republikan mendorong Trump adalah dengan tujuan untuk menjaga ekonomi Amerika Serikat. Hal ini yang menjadi alasan utama partai republikan terus mendorong Trump untuk mengeluarkan kebijakan menarik diri dari *Paris Agreement*. Ini juga dilakukan karena jika tetap berpaku dengan perjanjian tersebut dengan beberapa aturan yang tidak adil bagi Amerika Serikat sebagai negara maju, akan dapat berdampak di sektor industri minyak gas dan batu bara. Bisa saja para investor dari beberapa industri tidak jadi membuka dan saling berinvestasi kepada Amerika Serikat dikarenakan beberapa aturan yang ketat di dalam *Paris Agreement*. Kemudian hal ini akan sangat berdampak bagi laju ekonomi Amerika Serikat pada pemerintahan Trump. Sebanyak 40 kelompok kepentingan, mulai dari kelompok pemikir yang memang sudah dipastikan sayap kanan dan aktivis konservatif seperti *Heritage Foundation*, *American For Tax Reforms*, *Koch Brother* dan *Institut Hertland* juga ikut menuliskan surat kepada Trump. Surat ini memiliki tujuan sama dengan para senator sebelumnya untuk mendorong Trump memberlakukan kebijakan menarik diri dari *Paris Agreement*. Selain itu partai Republikan juga berpikir bahwa adanya permasalahan iklim hanya sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan (Prokop 2017).

Memang Semua ini dilakukan Trump untuk menjaga konstitusi dari pemerintahannya dan untuk domestik Amerika Serikat. Dilansir melalui polling yang dilakukan oleh The-post ABC, Mayoritas sebanyak 67% pendukung dari kebijakan Trump untuk keluar dari Paris Agreement adalah berasal dari Partai Republikan. Seperti salah satu contoh adanya dukungan melalui Scott Pruitt selaku *Environmental Protection Agency Administrator* Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwa hanyalah kerugian yang akan di dapatkan dengan “janji” di dalam Paris Agreement. Selain itu, menurutnya juga setiap negara akan memiliki kadar penurunan emisi gas karbon masing-masing tanpa harus disesuaikan dengan *Paris Agreement*. Dapat disimpulkan bahwa memang dengan adanya dukungan internal partai membuat Trump semakin menggebu untuk membuat kebijakan. Memang sebuah kebijakan tidak sepenuhnya sudah menjadi kebijakan yang paling baik, akan tetapi Trump juga akan tetap menangani masalah iklim menggunakan caranya sendiri tidak terikat dengan Paris Agreement (Dennis dan Clement 2017).

Dengan adanya dorongan langsung melalui beberapa kelompok kepentingan seperti yang sudah disebutkan pada bahasan diatas, ini menunjukkan bahwa faktor internal dengan indikator *society* melalui opini dan pemikiran orang-orang partai republikan memang memiliki peran yang besar untuk mendorong Trump akhirnya membuat kebijakan keluar dari *Paris Agreement*. Kelompok-kelompok kepentingan ini lah yang sangat berperan pada saat pemerintahan Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Pada dasarnya, yang mereka lakukan adalah untuk memberikan keuntungan kepada Amerika Serikat juga. Seperti kelompok kepentingan partai republikan dari pebisnis industri minyak, gas dan batu bara yang pastinya akan memberikan

keuntungan juga yang dalam hal ini *win win solution* dengan adanya tindakan Trump mengeluarkan kebijakan untuk keluar dari *Paris Agreement*. Semua dilakukan untuk kepentingan bersama baik Amerika Serikat, kelompok kepentingan hingga Trump dan pemerintahannya.

### 3.1.3 *Human Environment: Kepentingan Domestik Amerika Serikat Sebagai Pertimbangan*

Jika melihat faktor internal dari keputusan Trump mengeluarkan kebijakan ini, memang sebenarnya berkesinambungan dengan kebutuhan dalam negeri Amerika Serikat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya di sub bab 2.2, yang menjelaskan bahwa faktor utama Trump adalah hanya ingin meningkatkan perekonomian Amerika Serikat dengan memperbaiki sektor lapangan pekerjaan serta investasi untuk masa kini dan di masa depan sesuai dengan perekonomian seperti masa pemerintahan presiden terdahulu Amerika Serikat yang berasal dari partai yang sama dengan Trump. Dalam pidatonya di gedung White House pada Juli 2017, beliau mengatakan “*The Paris accord will undermine our economy and put us at a permanent disadvantage.*” “*It’s time to exit*” perkataan ini juga didukung oleh ketua Komite Nasional Partai Republik Ronna McDaniel. Alasan selanjutnya adalah Trump berpendapat bahwa adanya *Paris Agreement* juga membebani pajak masyarakat Amerika Serikat dan Trump hanya berupaya untuk menyelamatkan ekonomi negara ini dari hilangnya jutaan pekerjaan akibat output negara yang tidak stabil pada tingkat perekonomiannya (Chakraborty 2017).

Menyinggung hal yang berkesinambungan dengan kebutuhan dalam negeri Amerika Serikat dengan adanya kebijakan Trump keluar dari *Paris Agreement* adalah

terkait kepentingan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab utama menurut Trump. Dengan adanya rasa ketidakadilan terkait regulasi *Paris Agreement* dan kemudian Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari perjanjian tersebut, berimpacat kepada pemasukan investasi negara. Sebagai contoh adalah pada saat tahun 2018 perusahaan Foxconn membuka pabrik di wilayah Mont Pleasant Wisconsin, Amerika Serikat. Adanya keterbukaan investasi perdagangan ini lah yang kemudian dimaksud oleh Trump sebagai awal langkah untuk mengembangkan bidang ekonomi Amerika Serikat agar lebih baik lagi. Devisa negara untuk Amerika Serikat akan masuk menjadi income pemerintahan dan kemudian masyarakat Amerika Serikat juga mendapat hal positif yakni bisa membuka lapangan pekerjaan buruh untuk pabrik ini. Bukan hanya dilihat dari sektor pendapatan negara akan tetapi masyarakat Amerika Serikat, khususnya lapangan pekerjaan dapat setidaknya sedikit mulai terpenuhi (Pratomo 2018).

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, posisi Amerika Serikat dan alasan Trump keluar dari *Paris Agreement* memiliki korelasi yang sangat jelas untuk kemudian hal ini sampai terjadi. Kepentingan domestik dan kesejahteraan masyarakat negara menjadi hal yang utama bagi kemajuan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Trump sebagai pemangku kekuasaan tertinggi negara dapat mengeluarkan kebijakan tersebut. Dengan melihat beberapa alasan kuat yang disuarakan oleh Trump, penulis beranggapan bahwa memang benar yang dilakukan oleh Trump dalam mengambil sebuah kebijakan dan ini sesuai dengan teori *decision making* Richard Snyder. Trump memikirkan faktor-faktor dalam negeri untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan domestik Amerika Serikat. Perlu diingat bahwa posisi Trump sebagai *decision makers*, tidak akan mengeluarkan kebijakan dan memutuskan

sebuah keputusan jika tidak ada dorongan dari domestik Amerika Serikat dan hal ini juga memiliki korelasi dengan indikator *Human Environment* yaitu adanya dorongan manusia dapat membuat suatu kebijakan. Dimana indikator ini menjelaskan Trump sebagai kepala negara dan posisi kepentingan domestik atau nasional Amerika Serikat menjadi fokus utama dari kelangsungan perpolitikan Amerika Serikat. Oleh karena itu, adanya regulasi *Paris Agreement* dirasa tidak terlalu penting untuk dijadikan fokus pembahsan dalam dunia internasional.

### **3.2 Social Structure and Behavior**

Terdapat salah satu variabel yang sebenarnya tergabung dalam variabel internal setting. Variabel *social structure and behavior* jika dijelaskan oleh Snyder merupakan salah satu faktor yang saling berkesinambungan dengan faktor internal. Hal ini dikarenakan struktur sosial yang ada dan bagaimana masyarakat tersebut bertindak, kemudian dapat mempengaruhi seorang decision maker dalam pengambilan sebuah keputusan dan membuat kebijakan. Terdapat beberapa indikator yang dijelaskan oleh Snyder di dalam variabel social structure and behavior, namun penulis hanya memakai indikator *major institutional pattern*. Hal ini karena indikator ini sesuai dengan faktor pendorong Trump dalam mengambil sebuah kebijakan.

#### *3.2.1 Major Institutional Pattern: Slogan Politik Trump*

Dalam membuat sebuah kebijakan, seorang *decision maker* akan mempunyai pemikirannya sendiri yang kemudian hal tersebut menjadi sebuah pembenaran. Dalam tulisan ini, penulis mencoba membahas pola dan prinsip Trump sebagai *decision maker*

dalam mengambil keputusan untuk keluar dari *Paris Agreement*. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2, prinsip politik luar negeri Trump adalah dengan digambarkannya dengan slogan yang selalu beliau gunakan dari awal kampanye hingga pemerintahannya berlangsung. *America first* merupakan salah satu slogan dan menjadi prinsip politik pemerintahan Trump untuk mengedepankan kepentingan domestik ternyata banyak menuai kontra. Padahal dalam prinsip ini Trump hanya berkeinginan untuk mengatasi permasalahan domestik Amerika Serikat dan menjadikan kepentingan nasional menjadi kesadaran yang utama bagi masyarakat Amerika Serikat.

Sebenarnya, dalam mengeluarkan kebijakan Trump hanya ingin melindungi kepentingan domestik daripada negaranya sendiri. Akan tetapi, tindakan Trump ini yang kemudian dipandang oleh seluruh aktor negara sebagai rasa tidak melindungi apa yang terjadi pada kondisi global. Apa yang dilakukan Trump dengan prinsip politik *America first* adalah sebuah cara Trump untuk menghalangi permasalahan baru diluar domestik Amerika Serikat masuk kedalam negaranya. Trump menggunakan cara untuk membuat kebijakan yang otoriter dan aturan yang kuat untuk masyarakat Amerika Serikat meskipun terkadang bertentangan dengan apa yang sudah terlihat baik. Trump melihat adanya tatanan internasional yang liberal dan memang berpusat pada kekuatan Amerika Serikat. Hal ini yang kemudian menjadikan Trump tetap bersikeras untuk menggunakan prinsip *America first* di dalam kebijakan luar negeri nya ataupun menjadikan prinsip politik pemerintahannya (Rowe 2022).

Trump dalam *speech* nya di Mayflower Washington berkata bahwa Amerika Serikat sebenarnya memiliki sumber daya yang berlebih. Hal ini yang semestinya di selaraskan dengan prinsip *America first* karena memang sumber daya berlebih itu

adalah kepemilikan dari negara Amerika Serikat sendiri dan hal tersebut memang seharusnya diatur oleh kebijakan domestik yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Trump juga berkata bahwa pengeluaran yang boros yang dilakukan oleh presiden sebelumnya adalah salah satu tindakan yang tidak mencerminkan America first. Karena pengeluaran yang besar untuk pihak luar Amerika Serikat hanya akan merugikan domestik Amerika sendiri. Jika dilihat melalui data perbankan Amerika Serikat, defisit negara juga sudah mencapai \$1 per tahun. Trump hanya ingin mengembalikan “harta” yang semestinya dimiliki oleh masyarakat Amerika Serikat dan bukan malah memberikannya dengan cuma-cuma untuk pihak luar tanpa ada benefit bagi masyarakat dalam negeri (Beckwith 2017).

Menyimpulkan dari beberapa data yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa struktur sosial yang terdapat di masyarakat Amerika Serikat tetap memiliki peran penting dalam pembangunan sektor negaranya. Apalagi Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang mana terkenal menjadi sebuah negara dengan kekayaan sumber daya dan juga kehebatan masyarakatnya. Trump memilih untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari *Paris Agreement* hanya dengan tujuan untuk mengembalikan strata domestik Amerika Serikat ke peringkat pertama. Hal ini yang menurut penulis dalam variabel *social structure and behavior* dalam indikator *major institution pattern* sangat sesuai dengan slogan Trump saat memimpin pemerintahan Amerika Serikat dalam setiap pengambilan keputusan hingga pembuatan sebuah kebijakan.

### 3.3 External Setting Approach Decision Making

Faktor kedua dapat dari faktor *external setting*. Dalam hal ini, “dunia luar” atau *external* disini adalah sebagai pendorong yang secara tidak langsung mempengaruhi sang aktor untuk mengambil keputusan atau membuat keputusan. Decision makers juga melihat beberapa faktor pendukung dari luar negaranya untuk kembali menunjang keputusan yang dibuat. Hal ini dilakukan karena jika seorang *decision makers* membuat kebijakan atau keputusan kemudian mendapat dukungan *external*, maka hal tersebut akan semakin memperkuat tekadnya dalam pengambilan sebuah keputusan. Selain itu hal external lainnya adalah dimana seorang *decision makers* merasa ada ketidakadilan dari pihak luar, yang kemudian menjadikan mereka mengambil langkah untuk membuat suatu kebijakan dengan tujuan kepentingan nasional. Melihat aturan yang dikeluarkan oleh Trump untuk Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement* dan dikaitkan dengan Variabel *external setting* sebenarnya memiliki kesesuaian dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu dijelaskan pula oleh Snyder bahwa di dalam variabel external setting terdapat indikator yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun penulis hanya akan menggunakan indikator *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* dan *Non human environment* karena kedua indikator sangat relevan dengan faktor pendorong kebijakan Trump keluar dari *Paris Agreement*.

#### 3.3.1 *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* : *Dukungan Arab Saudi dan Aramco*

Trump yang sangat berpegang teguh dengan keputusannya dan rasa “dirugikan”

dengan adanya perjanjian ini juga merasa mendapat dorongan kuat dari negara maju lainnya, untuk akhirnya berani mengeluarkan kebijakan yang menuai kontra. Amerika Serikat bersama dengan negara maju lainnya seperti Arab Saudi benar-benar menentang adanya pelestarian lingkungan jika hal tersebut harus mengorbankan distribusi dan industri minyak dan gas bumi juga fosil. Adanya data yang dikeluarkan oleh *Institute of International and European Affairs*, Amerika Serikat sendiri melalui sektor perbankan lebih banyak mengeluarkan investasi untuk sektor batubara dan minyak dan berbanding terbalik dengan investasi dana untuk sektor energi terbarukan yang diperuntukkan untuk mengurangi emisi gas karbon atau pemanasan global (Surbakti 2018).

Adanya dukungan dari pihak external ini lah yang menjadikan tindakan Trump semakin kuat dalam mengambil keputusan untuk keluar dari *Paris Agreement*. Seperti yang dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, adanya ketidakadilan regulasi *Paris Agreement* ini juga pada akhirnya membuka mata negara maju lainnya, salah satunya Arab Saudi melalui industri minyak negaranya. Mungkin bisa jadi, Arab Saudi juga memiliki pemikiran yang sama dengan Trump dalam hal kemajuan ekonomi melalui pemanfaatan industri sumber daya minyak, gas bumi dan fosil. Tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak dari beberapa negara berkembang, yang sebenarnya membutuhkan sumber daya fosil dan minyak gas bumi untuk beberapa waktu kedepan. Amerika Serikat dan Arab juga berpendapat bahwa adanya upaya mencari cara yang lebih efisien guna menekan penggunaan bahan bakar fosil merupakan kepentingan global tanpa melihat adanya pertimbangan dari kondisi negara berkembang tersebut. Salah satu yang juga menyuarakan suara seperti Trump adalah perusahaan Saudi

Aramco yang menolak untuk menurunkan penjualan kadar minyak bumi mereka (DP 2022).

Adanya faktor external yang kemudian secara tidak langsung ikut menjadi bagian dan mendorong pemerintahan Trump untuk membuat kebijakan keluar dari *Paris Agreement* tidak semata-mata hanya karena kepentingan pribadi negara tersebut. Dalam hal ini Arab Saudi mengiyakan adanya aksi penurunan emisi gas, akan tetapi mereka juga tidak akan mau industri fosil dan gas yang menopang perekonomian negara mereka menjadi terdampak. Oleh karena itu adanya dukungan Arab Saudi melalui sektor kerjasama industri fosil inilah yang membuat Trump semakin terdorong untuk mengeluarkan kebijakan Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement*. Investasi industri fosil yang dijalankan bersama Arab Saudi adalah sebuah bentuk kerjasama bilateral yang berdampak baik untuk domestik Amerika Serikat dalam segi diplomasi dan juga berdampak baik bagi peningkatan income ekonomi Amerika Serikat. Menurut penulis, hal yang dilakukan oleh produsen minyak terbesar di dunia yaitu Saudi Aramco merupakan sesuatu hal yang dilakukan atas kepentingan domestik industri nya. Jika melihat kesamaan dengan kebijakan Trump, baik Saudi Aramco dan Trump sama-sama memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan domestik masing-masing sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. Memang jika terus-menerus melakukan penggalian bahan bakar fosil, hal itu akan menyebabkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Akan tetapi perlu juga ditinjau bahwa dengan adanya regulasi penurunan kadar penggunaan minyak, gas dan batu bara yang terdapat di dalam *Paris Agreement* juga seharusnya dilakukan sama rata oleh seluruh perusahaan di dunia. Adanya ketidakadilan dalam melakukan regulasi *Paris*

*Agreement*, dapat menjadikan regulasi ini hanya menjadi janji saja bukan sesuatu hal yang wajib dilakukan bagi seluruh negara pada akhirnya. Regulasi yang masih kendur pun menjadi faktor utama berubahnya kepercayaan yang awalnya ada menjadi sesuatu hal merugikan bagi negara maju.

### 3.3.2 *Non-Human Environment: Kegagalan Implementasi China*

Amerika Serikat khususnya pemerintahan Trump juga semakin menjadi-jadi dalam membuat keputusan ini karena melihat China dan Jerman. Kedua negara tersebut diketahui saling dan masih menjadi bagian dari *Paris Agreement* namun tetap melakukan tindakan yang tidak mengikuti poin yang terdapat di *Paris Agreement*. Dikatakan bahwa adanya *Paris Agreement* dapat membantu semua negara di dunia untuk mengurangi emisi gas karbon. Namun faktanya China walaupun sudah ikut meratifikasi dan mendukung aturan *Paris Agreement* tetap tidak bisa mengurangi emisi gas karbon negaranya. Pada tahun 2017 hingga 2018, tercatat sebanyak dua kali lipat kadar karbon dioksida yang berasal dari China bertambah. Selanjutnya diikuti oleh Jerman yang juga menambah karbon dioksida yang ada dikarenakan terdapat keputusan untuk menutup pembangkit listrik tenaga nuklir (Fumento 2017).

Dilihat dari tahun 2017, memang kedudukan Amerika Serikat dalam perihal emisi gas karbon masih menduduki peringkat pertama. Namun Trump melihat adanya hal tersebut juga sebenarnya mengambil concern akan kenaikan emisi gas karbon dengan melakukan caranya sendiri yang tidak dikemukakan ke publik. Dilansir melalui *Climate Action Tracker*, China menyusul peringkat kenaikan emisi gas karbon sebanyak 13.400 Metrik ton emisi karbon dan menduduki peringkat satu setelah

Amerika Serikat. Regulasi dari *Paris Agreement* semakin terlihat hanyalah sebuah janji dari negara-negara yang ikut meratifikasi perjanjian tersebut. China sendiri tidak cukup berambisi untuk dapat membatasi dan memberlakukan batas kenaikan suhu global sebanyak 1,5 celcius (Maizland 2021).

Adanya hal ini membuat Trump semakin merasa dan melihat bahwa salah satu negara yang ikut meratifikasi *Paris Agreement* juga tidak secara baik menjalankan regulasi yang ada. Hal ini juga semakin menjadi tanda tanya besar untuk China sebagai negara maju dan menyuarakan keikutsertaannya dengan *Paris Agreement* bagaimana mereka menjalankan regulasi yang ada tetapi emisi gas karbon negara mereka masih tidak dapat stabil. Oleh karena itu, sebenarnya bisa saja Amerika Serikat mengoptimalkan penurunan emisi gas karbon tanpa terikat oleh *Paris Agreement*. Perlu dilihat juga bahwa Trump juga berkaca dengan negara lain yang memang negara tersebut mendeklarasikan keikutsertaannya dan mendukung aturan dari *Paris Agreement*. Namun, negara tersebut tidak sepenuhnya mengikuti arahan dan poin yang disusun dalam perjanjian tersebut. Hal yang dianggap sepele ini oleh negara yang pro akan *Paris Agreement* sebenarnya akan menjadikan negara tersebut malah berbalik merugi. Jika China dalam hal ini memang memberlakukan pro untuk *Paris Agreement*, sebaiknya dilakukan dengan optimal dan hal tersebut dapat menjadi kaca mata dunia bahwa memang benar *Paris Agreement* bukan hanya sebuah janji, tetapi lebih dari itu.

Menyimpulkan dari keputusan Trump yang bersikeras untuk Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement*, dengan sekali lagi merujuk kepada variabel *external setting* dari teori Snyder ini adalah sangat sesuai. Menurut penulis, adanya faktor *external setting* ini apalagi Trump langsung melihat dari negara yang sama-sama

memiliki power yang kuat di dunia namun mereka tidak menjalankan regulasi sesuai dengan perjanjian ini adalah pukulan telak bagi China. Tanpa harus merasa China lebih baik dari segi lingkungan dan penurunan emisi gas karbon nya, ternyata fakta menunjukkan bahwa tidak seperti yang selama ini China katakan kepada publik. Semua yang terjadi pada China dan bagaimana Amerika Serikat melihat hal tersebut yang kemudian menjadikan hal tersebut menjadi faktor pendorong Trump membuat kebijakan itu adalah yang dijelaskan secara singkat melalui faktor external setting dalam pengambilan keputusan Richard Snyder. Jadi, kaca mata yang digunakan Amerika Serikat terhadap China karena tidak dapat menjalankan regulasi sesuai ketentuan perjanjian dan tidak menghasilkan hasil yang signifikan pada penurunan emisi gas karbon adalah salah satu faktor yang secara tidak langsung membuat Trump semakin optimis untuk menarik diri dari *Paris Agreement*.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya variabel internal dan external setting dalam teori decision making Ricarhd Snyder memiliki korelasi dengan studi kasus. Kedua variabel dijelaskan untuk mengetahui bagaimana seorang decision makers dalam mengambil keputusan pasti karena adanya dorongan dari faktor domestik dan juga external. Variabel ini menjadi satu kesatuan yang sangat penting bagi decision maker, karena dapat menjadi bahan pertimbangan untuk nanti nya kebijakan dikeluarkan atau dibuat. Melihat internal dan external setting pada kebijakan Trump keluar dari *Paris Agreement* kedua faktor sangat menjadi penentu hingga akhirnya Trump bersikeras untuk membuat kebijakan. Internal setting dalam hal ini merupakan faktor pendukung dari domestik Amerika Serikat yang mendorong Trump membuat kebijakan. Faktor

domestik ini berasal dari sudut pandang Trump sebagai kepala negara dan kemudian ada pula partai republikan sebagai pendukung utama Trump dalam mengambil kebijakan. Kemudian external setting yang merupakan faktor luar yakni adanya dorongan dari kesamaan visi Arab Saudi (rasa ketidakadilan) yang sama dirasakan dengan Amerika Serikat terkait regulasi Paris Agreement dan melihat kondisi salah satu negara bagian dari perjanjian yang tidak menunjukkan hasil signifikan dari upaya menerapkan regulasi *Paris Agreement*.

Dengan sudah dijelaskan nya beberapa faktor pendorong Trump yang pada akhirnya mengeluarkan Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, memang seluruhnya sangat relevan dengan variabel dan beberapa indikator yang dijelaskan oleh Snyder. Faktor *internal*, *external* dan struktur sosial dijabarkan dengan begitu jelas sehingga memang benar Trump sudah memikirkan faktor-faktor yang ada untuk pada akhirnya memutuskan mengambil kebijakan keluar dari *Paris Agreement*. Hal yang dilakukan Trump memang tidak sepenuhnya menjadid sesuatu hal yang benar, namun adanya beberapa fakta dari faktor pendorong seorang decision maker dalam mengambil sebuah keputusan dan menciptakan kebijakan itu semua sudah diterapkan oleh Trump pada penggunaan hak nya sebagai kepala negara.

## BAB IV

### Kesimpulan dan Rekomendasi

#### 4.1 Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan terkait studi kasus dan juga analisis yang diberikan oleh penulis terhadap studi kasus ini. Seperti yang sudah dijelaskan secara keseluruhan pada bab awal hingga bab sebelumnya, Donald Trump sebagai Presiden Amerika pada saat itu memilih untuk menghilangkan posisi Amerika Serikat dari *Paris Agreement*. Akibat dari aksi Trump tersebut yang sangat menggebu-gebu itu menuai banyak pro dan kontra. Akan tetapi sejak awal Trump selalu menegaskan bahwa kebijakan yang diambil semata-mata hanya untuk mengembalikan Amerika Serikat seperti sedia kala “*Make America Great Again*” dan “*America first*”. Hal yang dimaksud dengan mengembalikan Amerika Serikat seperti sedia kala adalah dimana Amerika Serikat yang dengan sumber daya manusia yang banyak, mendapatkan lapangan pekerjaan yang banyak juga agar kesejahteraan perekonomian masyarakat Amerika Serikat dapat terpenuhi. Adanya kebijakan Trump untuk keluar dari *Paris Agreement* merupakan suatu hal yang dilakukan oleh pemerintahan Trump dengan matang. Kebijakan ini tidak akan keluar jika Trump tidak melihat apa yang terjadi dengan kondisi di Amerika Serikat.

Beberapa faktor pendorong Trump keluar dari *Paris Agreement* dari mulai adanya dorongan faktor internal berupa bagaimana kondisi geografis masyarakat Amerika Serikat dilihat dari masyarakat kelas menengah sebagai buruh dan pekerja di sektor pertambangan. Mereka memang masih sangat membutuhkan mata pencaharian

sebagai pekerja buruh pabrik. Jika regulasi perjanjian iklim dibuat secara ketat, maka akan berdampak bagi kondisi masyarakat kelas menengah. Selain itu terdapat pula peran dari para anggota partai republikan yang juga mendorong Trump untuk hanya berfokus kepada investasi pertambangan. Kemudian juga semakin di sempurnakan dengan adanya faktor melalui bagaimana kondisi domestik amerika serikat yang digambarkan oleh Trump untuk menjadikan beliau sebagai seorang kepala negara kemudian bersikeras membuat kebijakan keluar dari *Paris Agreement*. Selain itu terdapat dorongan dari *social structure* Amerika Serikat yaitu bagaimana prinsip politik Trump yang kemudian melihat bahwa tidak ada keuntungan dalam regulasi *Paris Agreement*. Selanjutnya adalah dorongan dari pihak *external* Amerika Serikat terdapat pada bagaimana Arab Saudi dan Aramco menentang regulasi *Paris Agreement* dan bagaimana kemudian Trump juga melihat kondisi China yang gagal dalam mengatur kondisi emisi gas karbon sesuai dengan regulasi perjanjian. Secara keseluruhan, faktor pendukung Trump membuat kebijakan untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari *Paris Agreement* terdapat pada berbagai macam faktor yang kompleks. Hal ini yang kemudian ingin penulis coba jelaskan dan urai secara mendetail bahwa faktor-faktor pendorong Trump membuat kebijakan keluar dari perjanjian ini merupakan sebuah hal yang memang sudah direncanakan dengan baik oleh Trump dan dijalankan pada saat pemerintahannya.

Jika dilihat menggunakan teori Richard Snyder dengan menggunakan variabel *internal setting*, *external setting* dan *social structure and behavior* kebijakan Trump sangatlah sesuai. Seluruh variabel yang ada dengan beberapa indikator yang sangat relevan dengan faktor pendorong Trump mengeluarkan sebuah kebijakan keluar dari

*Paris Agreement* adalah contoh nyata dari perwujudan seorang *decision makers* pada akhirnya memutuskan dan membuat sebuah kebijakan. Perlu ditegaskan bahwa tujuan dari Trump pada akhirnya mengambil kebijakan ini adalah untuk menambah rasa kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan pada sektor ekonomi dan juga tidak menutup mata bahwa memang benar dengan adanya beberapa poin dalam regulasi *Paris Agreement* membuat Amerika Serikat menjadi rugi.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam bab 1 sampai bab 3, berikut rekomendasi beberapa penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya:

1. Membahas terkait *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Trump dengan sudut pandang, teori dan tahun penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan judul yaitu “*Analisis Kebijakan Trump Keluar Dari Paris Agreement Dalam Perspektif Green Theory Tahun 2018-2021*”. Hal ini dilakukan guna meneliti kondisi lingkungan Amerika Serikat sesudah Trump akhirnya resmi mengeluarkan diri dari *Paris Agreement*.
2. Adanya peran negara lain yaitu Arab Saudi dan China dalam dinamika regulasi dari *Paris Agreement*, bisa menjadi hal baru yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya. Penulis merekomendasikan sebuah judul yaitu “*Keterkaitan Arab Saudi dan China dalam Regulasi Paris Agreement Ditinjau Dengan Perspektif Decision Making Process*” atau “*Dinamika Regulasi Paris Agreement Dalam*

*Kebijakan Arab Saudi Untuk Mempertahankan Industri Fosil Ditinjau  
Menggunakan Teori Politik Ekonomi”.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiel, Kenny Setya, dan Muhammad Respati Harun. 2018. "Rezim Para Penyangkal Pengaruh Kelompok Penyangkal Perubahan Iklim terhadap Kebijakan Politik Amerika Serikat di Bidang Lingkungan." *Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 01 (No. 1): 88 - 96.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/balairung/article/view/34900>.
- Alhadi, Beryl Rifqi. 2018. "Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Keluar Dari Paris Agreement (COP-21)." 5-6.
- Beckwith, Ryan Teague. 2017. *Read Donald Trump's 'America First' Foreign Policy Speech*. Politics, Time. <https://time.com/4309786/read-donald-trumps-america-first-foreign-policy-speech/>.
- Berube, Alan. 2018. *Where does the American middle class live?* Middle Class Memo, Brookings. <https://www.brookings.edu/research/where-does-the-american-middle-class-live/>.
- Beslik, Sasja. 2019. "5 Reasons Why the Paris Agreement is a Joke (and How We Can Fix It)." 18 Maret.
- Chakraborty, Barnini. 2017. "Paris Agreement on climate change: US withdraws as Trump calls it 'unfair'." *Fox News*, 1 June. Diakses August 7, 2022.  
<https://www.foxnews.com/politics/paris-agreement-on-climate-change-us-withdraws-as-trump-calls-it-unfair>.
- CNN Indonesia. 2021. "7 Negara Biang Kerok Emisi Karbon di Dunia." *CNN Indonesia*, 30 October.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211029165008-134-714174/7-negara-biang-kerok-emisi-karbon-di-dunia>.
- Dennis, Brady, dan Scott Clement. 2017. *Post-ABC poll: Nearly 6 in 10 oppose Trump scrapping Paris agreement*. Climate and Environment, The Washington Post News Letter. Diakses 2022.  
<https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/06/05/post-abc-poll-nearly-6-in-10-oppose-trump-scrapping-paris-agreement/>.
- DP, Yustinus Andri. 2022. "Penolakan Raksasa Minyak Dunia di Kampanye Penurunan Emisi." *Ekonomi*, 21 June. Diakses August 10, 2022.

- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220621/44/1546318/penolakan-raksasa-minyak-dunia-di-kampanye-penurunan-emisi>.
- Fumento, Michael. 2017. "The Paris Agreement Had No Teeth." *The American Conservative*, 7 June. Diakses August 10, 2022.  
<https://www.theamericanconservative.com/the-paris-agreement-had-no-teeth/>.
- Galka, Max. 2017. *America's geography of wealth: the shrinking urban middle class visualised*. Exploring Urban Data, The Guardian.  
<https://www.theguardian.com/cities/2017/may/17/america-geography-wealth-shrinking-urban-middle-class-visualised>.
- Gordon, David V., Divya Reddy, dan Elizabeth Rosenberg. 2017. *After Paris: A Climate Change Agenda That Serves U.S Interest*. Center for a New American Security.
- Hakim, Fadhlan Nur. 2018. "Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement." *Dauliyah* 3 (02): 150-165.  
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/2500/1495>.
- Jr., Perry Bacon; Enten, Harry;. 2017. *Was Trump's Paris Exit Good Politics?* Politics, Five Thirty Eight, ABC News. <https://fivethirtyeight.com/features/was-trumps-paris-exit-good-politics/>.
- Kompas.com. 2022. "10 Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar, Indonesia Kelima Halaman all - Kompas.com." *Travel Kompas*, 3 April. Diakses May 30, 2022. <https://travel.kompas.com/read/2022/04/03/220800827/10-negara-penyumbang-emisi-karbon-terbesar-indonesia-kelima?page=all>.
- Larison, Daniel. 2017. "Trump and the Paris Agreement." *The American Conservative*, 1 June. Diakses August 10, 2022.  
<https://www.theamericanconservative.com/trump-and-the-paris-agreement/>.
- Maizland, Lindsay. 2021. *Global Climate Agreements: Successes and Failures*. News Climate Change, Council of Foreign Relation. Diakses 2022.  
<https://www.cfr.org/backgrounder/paris-global-climate-change-agreements#chapter-title-0-7>.
- McCarthy, Tom. 2017. *The Republicans who urged Trump to pull out of Paris deal are big oil darlings*. Climate Crisis News, New York: The Guardian News.

- <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/01/republican-senators-paris-climate-deal-energy-donations>.
- McTague, Tom , dan Peter Nicholas. 2020. *HOW 'AMERICA FIRST' BECAME AMERICA ALONE*. News Global, London: The Atlantic. Diakses 2022.  
<https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/10/donald-trump-foreign-policy-america-first/616872/>.
- Pranita, Ellyvon. 2021. "Indonesia dan 4 Negara Lainnya Jadi Ancaman Gagalnya Perjanjian Paris, Kok Bisa? Halaman all." *Kompas.com*, 30 June. Diakses July 18, 2022.  
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/30/184500923/indonesia-dan-4-negara-lainnya-jadi-ancaman-gagalnya-perjanjian-paris-kok?page=all>.
- Pratomo, Yudha. 2018. *Foxconn Resmi Bangun Pabrik di Amerika Serikat*. News e-business, United State: Kompas.com. Diakses 2022.  
<https://tekno.kompas.com/read/2018/06/30/11262307/foxconn-resmi-bangun-pabrik-di-amerika-serikat>.
- Prokop, Andrew. 2017. *Don't just blame Trump for quitting the Paris deal — blame the Republican Party*. News, United States: Vox.  
<https://www.vox.com/2017/6/1/15726726/trump-paris-climate-agreement-republicans>.
- Pusparisa, Yosepha. 2019. "Inilah 20 Perusahaan Energi Penyumbang Emisi Terbesar | Databoks." *Databoks*. 14 December. Diakses June 16, 2022.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/14/ini-20-perusahaan-energi-penyumbang-emisi-terbesar>.
- Raiser, Kilian, Ulrike Kornek, Christian Flachsland, dan William F Lamb. 2020. "Is the Paris Agreement effective? A systematic map of the evidence." *Environmental Research Letters* (IOP Science).  
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab865c>.
- Rowe, David. 2022. *The Meaning of 'America First'*. Vol. 44.1 Summer 2022, dalam *Kenyon Alumni Magazine*. <https://bulletin.kenyon.edu/article/the-meaning-of-america-first/>.
- Sinaga, Irene F. t.thn. ""Analisis Emosi Presiden Donald Trump Terhadap Penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement."" *Journal of International*

- Relations* 06 (03): 413.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/27751/24156>.
- Sinaga, Irene F. 2020. "Analisis Emosi Presiden Donald Trump Terhadap Penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement." *Journal of International Relations* Volume 6 (No. 03): 413 - 415.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/27751/24156>.
- Sinaga, Irene F. t.thn. "Analisis Emosi Presiden Donald Trump Terhadap Penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement." *Journal of International Relations* Volume 6 (03): 414.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/27751/24156>.
- Sinaga, Irene F. t.thn. "Analisis Emosi Presiden Donald Trump Terhadap Penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement." *Journal of International Relations* 6 (03): 415.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/27751/24156>.
- Smeltz, Dina, Ivo Daalder, Karl Friedhof, Craig Kafura, dan Lily Wojtowicz. t.thn. "America engaged: American public opinion and US foreign policy." *CHICAGO COUNCIL SURVEY* 11-20.  
[https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/2020-11/report\\_ccs18\\_america-engaged\\_181002.pdf](https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/2020-11/report_ccs18_america-engaged_181002.pdf).
- Smith, Don C. 2021. "The United States re-engages with the world on climate change. But the question remains: is the US a dependable long-term partner?" Disunting oleh University of Denver Sturm College of Law *Journal of Energy & Natural Resources Law. JOURNAL OF ENERGY & NATURAL RESOURCES LAW* (Routledge Taylor & Francis Group) 39 (No 1): 1-11.  
<https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/02646811.2021.1872184?needAccess=true>.
- Snyder, Richard C, H W Bruck, dan Burton Sapin. 2002. *Foreign Policy Decision-Making*. England: Palgrave Macmillan.
- . 2002. *Foreign Policy Decision-Making*. England: Palgrave macmillan.
- . 2002. *Foreign Policy Decision-Making*. England: Palgrave Macmillan.
- . 2002. *Foreign Policy Decision-Making*. England: Palgrave Macmillan.
- Surbakti, Tesa Oktiana. 2018. "Sikap Pemerintah Trump Dorong Penggunaan Energi Fosil Tuai Protes." *Media Indonesia*, 11 December. Diakses June 16, 2022.

<https://mediaindonesia.com/internasional/203595/sikap-pemerintah-trump-dorong-penggunaan-energi-fosil-tuai-protes>.

Tumulty, Karen. 2017. *How Donald Trump came up with 'Make America Great Again'*. Politics, United States: The Washington Post. Diakses 2022.

[https://www.washingtonpost.com/politics/how-donald-trump-came-up-with-make-america-great-again/2017/01/17/fb6acf5e-dbf7-11e6-ad42-f3375f271c9c\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/politics/how-donald-trump-came-up-with-make-america-great-again/2017/01/17/fb6acf5e-dbf7-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html).

United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. "Paris Agreement." Paris, December. 8.

VOA Indonesia. 2018. "Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Tahun Ini Pecahkan Rekor." *VOA Indonesia*, 6 December. Diakses March 24, 2022.

<https://www.voaindonesia.com/a/tingkat-emisi-gas-rumah-kaca-tahun-ini-pecahkan-rekor/4689072.html>.

Wahyuni, Henni. 2018. "Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Paris 2015." *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional* 6 (04): 1794-1800.

[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/26.%201102045175%20-%20Henni%20Wahyuni%20\(11-14-18-03-49-03\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/26.%201102045175%20-%20Henni%20Wahyuni%20(11-14-18-03-49-03).pdf).